

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENDAMPINGI
GUBERNUR PADA SENGKETA PENETAPAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN ASAS – ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK
(STUDI KASUS GUGATAN SERIKAT PEKERJA FSP KAHUTINDO)**



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

Belgis Syfa Azzahra

NPM 22071010102

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENDAMPINGI
GUBERNUR PADA SENGKETA PENETAPAN UPAH MINIMUM**

**KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN ASAS - ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK
(STUDI KASUS GUGATAN SERIKAT PEKERJA FSP KAHUTINDO)**



SKRIPSI

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh

Belgis Syfa Azzahra

NPM 22071010102

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENDAMPINGI
GUBERNUR PADA SENGKETA PENETAPAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK
(STUDI KASUS GUGATAN SERIKAT PEKERJA ESP KAHUTINDO)**

Denyusun,

Belgis Syifa Azzahra
NPM 120710010102

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari Jumat, 03 Juli 2026

Pembimbing

Dosen Penguji:

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Waluya, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Dessy Maevangsari, S.H., L.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Anggota II,
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur

Dr. Erlich Rini Nawangarsi, M.Si.
NIP. 19580116 199403 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS NUKUN KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENDAMPINGI
GUBERNUR PADA SENGKETA PENETAPAN URAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
Pemerintahan Yang Baik
(STUDI KASUS GUGATAN SERIKAT PEKERJA FSP KAHUTINDO)**

Skrripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari Selasa, 14 April 2026

Penyusun,

Belgis Syfa Azzahra

NPM 22071010102

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENDAMPINGI
GUBERNUR PADA SENGKETA PENETAPAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN ASAS - ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK
(STUDI KASUS GUGATAN SERIKAT PEKERJA PSP KAHUTINDO)**

Penyusun,

Belgis Syifa Azzahra
NPM 22071010102

Skrripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari Jumat 03 Juli 2026

Pembimbing

Dosen Penguji:

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Dessy Maevahsari, S.H., LL.M
NIP. 19911229 202406 2 002

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur

Dr. Erifen Rining Nawangsari, M. Si
NIP. 19680116 199403 2 004

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Belgis Syfa Azzahra
NPM : 22071010102
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/ lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Penulis menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, April 2026



Belgis Syfa Azzahra
NPM 22071010102

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENDAMPINGI GUBERNUR PADA SENGKETA PENETAPAN UMK BERDASARKAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI KASUS GUGATAN SERIKAT PEKERTA FSP KAHUTINDO)”**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa ridho dan pertolongan-Nya, segala usaha yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengawali skripsi ini dengan ungkapan rasa syukur yang mendalam kepada-Nya.

Skripsi ini penulis susun sebagai syarat untuk menyusun skripsi pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti seringkali mengalami demotivasi, peneliti seringkali merasa tertinggal dari rekan – rekan peneliti yang telah menyelesaikan skripsinya lebih dulu. Namun berkat lagu berjudul 33x dari Perunggu, peneliti yakin bahwa “Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh, bersandar hibahkan bebanmu, rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru.” Selain itu, penyusunan skripsi ini juga menjadi kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih:

1. Ibu Kartinem ibuku terkasih, izinkan aku mengucapkan, semua beban yang bercampur bangga telah aku rengkuh, semua berpihak kepadaku, pasti doamu yang lancarkan upayaku, mesti doa yang meluncur dari bibirmu dan yang aku tau kau takkan pernah berhenti untuk tumbuhku kini, semoga sesuai dengan yang kau impi, dunia boleh saja menahanku atau perlahan bongkar mimpiku kupunya doamu ibu. Terima kasih yang sangat besar ya Ibu sudah selalu mendoakan yang terbaik untuk aku, aku tak akan jadi apa-apa kalau bukan karena doa Ibu.
2. Ayah Sutrisno ayahku yang sangat hebat dan keren, yang sudah mengusahakan semuanya hingga aku bisa berada pada posisi ini. Ayah, pelan pasti ku kabulkan segala catatan harapmu tentang masa depan tentang masa terang, karena ini yang kumau, berkah kepala yang batu, semua yang ragukan atau tak percaya, debu pagi kujelang, kebul jalan kuterjang. Terima kasih yang sangat besar untuk ayahku yang hebat terima kasih untuk tidak pernah mengeluh dan selalu mendoakan aku. Tanpa doa Ayah aku juga tak akan ada di sini.
3. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. bukan hanya Dosen Pembimbing Skripsi namun juga ibu penulis di kampus, yang telah membimbing penulis dengan sangat baik dari awal hingga akhir, yang selalu sabar menghadapi penulis yang terkadang tidak jelas, terima kasih besar ya Ibu sudah dengan sabar mengajari penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah

mengeluh, terima kasih besar untuk doa dan bimbingan Ibu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis, semoga Ibu sehat selalu dan semua urusan Ibu dipermudah.

4. Adik penulis Caroline Xena Sahiba, terima kasih banyak ya kamu salah satu motivasi aku agar segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga Penulis kakek, nenek, paman, bibi dan semua keluarga penulis yang belum bisa disebutkan satu persatu terima kasih banyak sudah selalu mendukung penulis selama menyelesaikan pendidikan ini.
6. Terima kasih Kepada Mahesa Perkasa, Nadya Arinal, Aldea Evelyn sebagai teman dekat seperkuliahan dan seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan menemani penulis selama proses penyusunan skripsi dan selalu membantu penulis jika penulis kesulitan mengerjakan skripsi.
7. Terima kasih kepada Galuh Julieta teman dekat penulis sejak SMP, dan Indah Khomaria teman dekat penulis semasa SMA, terima kasih ya sudah menjadi temanku yang baik dan *support* semua prosesku, semoga kalian sukses selalu.
8. Terima kasih Bapak Rully Budi Krisbandono, S.H., M.H., Koordinator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, sebagai Narasumber penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak Bapak atas bimbingannya selama magang di Disnakertrans dan semua informasi yang penulis peroleh untuk penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih Kepada teman seperbimbingan Ibu Adhitya yang sudah membantu penulis jika ada kesulitan dalam menulis skripsi ini dan teman-

teman di *decrant* terkhusus buat mbak Dewi Oktavia yang selalu menemani penulis dan mendengarkan keluh kesah penulis selama di tempat kerja.

10. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
11. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
12. Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
13. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M. H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
14. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
15. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
16. Bapak dan Ibu Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang Selalu membimbing penulis selama Magang MBKM Berlangsung.
17. Terima kasih banyak buat semua yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, tanpa kalian semua skripsi ini tidaklah mudah.

18. Terima kasih Belgis Syfa Azzahra *soon to be* bu Haji, S.H.M.H, *hehehe Aamiin*, kamu keren kamu hebat sudah hidup sampai sekarang, sudah menyelesaikan skripsi ini. Semoga jadi orang makmur dan sukses membanggakan Ayah dan Ibu, dan selalu rendah hati.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi tambahan pengetahuan dalam bidang hukum.

Surabaya, April 2026

Penulis,

INTISARI

Nama : Belgis Syfa Azzahra
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 08 Agustus 2003
NPM : 22071010102
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

ANALISIS HUKUM KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENDAMPINGI GUBERNUR PADA SENGKETA PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

(STUDI KASUS GUGATAN SERIKAT PEKERJA FSP KAHUTINDO)

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji kewenangan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dalam mendampingi Gubernur pada proses penetapan UMK Tahun 2025, yang berujung pada gugatan Serikat Pekerja FSP KAHUTINDO atas Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024. Gubernur menetapkan kenaikan UMK 5%, menyimpangi formula 6,5% dalam Permenaker No. 16 Th. 2024, sehingga Putusan No. 11/G/2025/PTUN.SBY mengabulkan gugatan dan mewajibkan pencabutan keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui wawancara dengan pejabat Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, analisis putusan pengadilan, dan studi peraturan perundang-undangan guna menganalisis kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Hasil penelitian pertama, kewenangan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur bersumber pada UU No. 6 Th. 2023 *jo*. PP No. 51 Th. 2023, mencakup survei KHL, verifikasi data BPS, koordinasi 38 kabupaten/kota, dan penyusunan rekomendasi teknis kepada Gubernur. Meski mekanisme formal telah dijalankan, PTUN menyatakan Keputusan Gubernur melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas karena penyimpangan dari formula imperatif dilakukan tanpa justifikasi dan dokumentasi yang memadai. Kedua, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur menghadapi kendala berupa ambiguitas Pasal 27 ayat (2) PP No. 51 Th. 2023 yang tidak menetapkan indikator jelas untuk penyimpangan formula, keterbatasan SDM, serta minimnya kapasitas penanganan sengketa di PTUN. Sebagai upaya perbaikan, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur menyusun SOP baru, memperkuat koordinasi lintas lembaga, dan mengusulkan revisi regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelemahan penerapan AUPB dalam aspek transparansi dan kepastian hukum menjadi penyebab utama batalnya Keputusan Gubernur. Direkomendasikan agar PP No. 51 Th. 2023 direvisi untuk mempertegas kriteria penyimpangan formula agar Disnakertrans Provinsi Jawa Timur membangun tata kelola penetapan UMK yang transparan dan berbasis data secara berkelanjutan. **Kata Kunci : Upah Minimum Kabupaten/Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Sengketa Ketenagakerjaan, Pengadilan Tata Usaha Negara, FSP KAHUTINDO.**

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF THE MANPOWER AND TRANSMIGRATION OFFICE OF EAST JAVA PROVINCE IN ASSISTING THE GOVERNOR IN THE DISPUTE OVER THE DETERMINATION OF THE DISTRICT/CITY MINIMUM WAGE BASED ON THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE (CASE STUDY: LAWSUIT BY FSP KAHUTINDO WORKERS' UNION)

ABSTRACT: This study examines the authority of the Manpower and Transmigration Office (Disnakertrans) of East Java Province in assisting the Governor in the process of determining the District/City Minimum Wage (UMK) for 2025, which led to a lawsuit filed by the FSP KAHUTINDO Workers' Union against the Governor of East Java's Decree Number 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024. The Governor set a 5% UMK increase, deviating from the 6.5% formula stipulated under Ministerial Regulation Number 16 of 2024, prompting the Surabaya Administrative Court (PTUN) through Decision Number 11/G/2025/PTUN.SBY to grant the lawsuit and order the revocation of the decree. This study employs an empirical legal method with a descriptive-analytical approach, conducted through interviews with Disnakertrans officials, analysis of court decisions, and review of applicable legislation, in order to examine the gap between legal norms (*das sollen*) and their implementation in practice (*das sein*). The findings reveal two key conclusions. First, Disnakertrans's authority derives from Law No. 6 of 2023 in conjunction with Government Regulation No. 51 of 2023, encompassing tasks such as conducting Decent Living Needs surveys, verifying BPS statistical data, coordinating input from 38 districts/cities, and preparing technical recommendations for the Governor. Although formal procedures were followed, the Administrative Court found that the Governor's Decree violated the General Principles of Good Governance (AUPB) particularly the principles of legal certainty, transparency, and proportionality as the deviation from the mandatory formula lacked adequate justification and documentation. Second, Disnakertrans faced several obstacles, including regulatory ambiguity in Article 27 paragraph (2) of PP 51/2023 which provides no clear indicators for formula deviation, limited human resources, and insufficient capacity to handle administrative court proceedings. In response, Disnakertrans developed new standard operating procedures, strengthened inter-agency coordination, and proposed regulatory revisions. This study concludes that weaknesses in applying the AUPB principles particularly regarding transparency and legal certainty were the primary cause of the Governor's Decree being annulled. It is recommended that PP No. 51 of 2023 be revised to clarify the criteria for formula deviation, and that Disnakertrans establish a transparent, data-driven, and sustainable UMK determination framework going forward. **Keyword: District/City Minimum Wage, Disnakertrans East Java, General Principles of Good Governance, Labor Dispute, Administrative Court, FSP KAHUTINDO.**

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN REVISI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Tinjauan Pustaka.....	18
BAB II KESESUAIAN ANTARA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DENGAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENDAMPINGI GUBERNUR PADA PENETAPAN UMK DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).....	45
2.1 Kesesuaian Antara Peraturan Perundang – Undang Dengan Pelaksanaan Kewenangan Dinas Tenaga Kerja	45

	Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Pada Penetapan UMK.....	
2.2	Menganalisis Fokus Penerapan AUPB Dalam Studi Kasus Gugatan Serikat Pekerja FSP KAHUTINDO.....	55
BAB III	KENDALA DAN UPAYA YANG DIHADAPI OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA MENDAMPINGI GUBERNUR PADA PROSES PENETAPAN UMK YANG MEMICU SENGKETA DENGAN SERIKAT PEKERJA FSP KAHUTINDO.....	63
3.1	Kendala Yanag Dihadapi Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Dalam Melaksanakan Kewenangan Mendampingi Gubernur Pada Proses Penetapan UMK Sengketa Dengan FSP Kahutindo.....	63
3.2	Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dan Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Dalam Proses Penetapan UMK Yang Sesuai Dengan Prinsip AUPB.....	68
BAB IV	PENUTUP.....	72
4.1	Kesimpulan.....	72
4.2	Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	77
	LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Berkaitan UMK

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian Skripsi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Sertifikat *English Proficiency Test*
- Lampiran 2: Transkrip Nilai
- Lampiran 3: Persetujuan Ujian Skripsi
- Lampiran 4: Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 5: Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
- Lampiran 6: Formulir Persetujuan Judul
- Lampiran 7: Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8: Bukti KRS Terbaru
- Lampiran 9: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Laporan Proposal Skripsi
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Plagiasi
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal
- Lampiran 14 : Sertifikat *Library Class*
- Lampiran 15 : *Letter Of Acceptance* Jurnal Sinta 4
- Lampiran 16 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 17 : Surat Pengantar Penelitian Skripsi
- Lampiran 18 : Bukti Wawancara Pejabat Disnakertrans Provinsi Jawa Timur
- Lampiran 19 : Link Referensi
- Lampiran 20: Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 21: Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 22: Lembar Revisi Dosen Penguji 3

DAFTAR SINGKATAN

ABBB : Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

AUPB : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

BPS : Badan Pusat Statistik

Disnakertrans : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DPD : Dewan Pimpinan Daerah

DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

FSP : Federasi Serikat Pekerja

FSP KAHUTINDO : Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia

HAN: Hukum Administrasi Negara

HI dan Jamsos: Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Jatim : Jawa Timur

jo. : juncto

Kepmenaker No. KEP- 226/MEN/2000 : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan

Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1,Pasal 3,Pasal 4,Pasal

8,Pasal,11,Pasal20,Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-

01/Men/1999 Tentang Upah Minimum

KHL : Kebutuhan Hidup Layak

KRS : Kartu Rencana Studi

KSPI : Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

KTUN : Keputusan Tata Usaha Negara

KUHPerdata : Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

LNRI : Lembaran Negara Republik Indonesia

Magang MBKM : Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka

No. : Nomor

Pemda : Pemerintahan Daerah

Perda: Peraturan Daerah

Pergub : Peraturan Gubernur

Permenaker : Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Permenaker No. 16 Th. 2024 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Permenaker No. PER-01/MEN/1999 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

PHI : Perselisihan Hubungan Industrial

PP : Peraturan Pemerintah

PP No. 36 Th. 2021 : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

PP No. 51 Th. 2023 : Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

PP No. 8 Th. 1981 : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Prov. : Provinsi

PTUN: Pengadilan Tata Usaha Negara

SDM : Sumber Daya Manusia

SK : Surat Keputusan

SOP : Standard Operating Procedure

Th. : Tahun

TLNRI : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

TUN : Tata Usaha Negara

UKT : Uang Kuliah Tunggal

UMK : Upah Minimum Kabupaten/Kota

UMP : Upah Minimum Provinsi

UU : Undang - Undang

UU No. 13 Th. 2003 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU No. 14 Th. 2008 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 2 Th. 2022 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

UU No. 23 Tahun 2014 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 30 Th. 2014 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU No. 5 Th. 1986 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No. 6 Th. 2023 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

UU No. 9 Tahun 2015 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 51 Th. 2009 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UUD NRI 1945 : Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945